

Katalog: 4101029.72

STATISTIK KETAHANAN SOSIAL

PROVINSI SULAWESI TENGAH 2023

Volume 4, 2024



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH

STATISTIK KETAHANAN SOSIAL

PROVINSI SULAWESI TENGAH

2023

Volume 4, 2024

<https://sulteng.bps.go.id>



STATISTIK KETAHANAN SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH 2023

Volume 4, 2024

Katalog : 4101029.72
Nomor Publikasi : 72000.24018

Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm
Jumlah Halaman : xii+56 Halaman

Penyusun Naskah : BPS Provinsi Sulawesi Tengah
Penyunting : BPS Provinsi Sulawesi Tengah
Pembuat Kover : BPS Provinsi Sulawesi Tengah
Penerbit : ©BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Sumber Ilustrasi : canva.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

Tim Penyusun

Statistik Ketahanan Sosial Provinsi Sulawesi Tengah 2023

Volume 4, 2024

Pengarah :

Drs. Simon Sapary, M.Sc.

Penanggung Jawab :

Ir. Jefrie Wahido, M.Si.

Editor :

Mayanti Meylisa Toding, S.S.T., M.Sc.

Penulis Naskah dan Pengolah Data:

Ahmad Risal, S.Tr.Stat.

KATA PENGANTAR

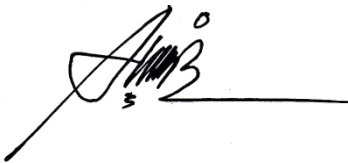
Statistik Ketahanan Sosial merupakan indikator yang mengukur dan menganalisis dampak sosial dari perubahan yang bersifat lintas sektoral. Perubahan tersebut disebabkan karena globalisasi, reformasi dan otonomi daerah. Penyediaan data Statistik Ketahanan Sosial ini akan sangat bermanfaat dalam mendiagnosa sebab-sebab perubahan sosial yang terjadi beserta dampak yang ditimbulkannya.

Publikasi Statistik Ketahanan Sosial Provinsi Sulawesi Tengah 2023 ini menyajikan gambaran yang komprehensif terhadap masalah ketahanan sosial. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik dan data sekunder dari instansi lain di luar BPS.

Kepada semua pihak yang telah membantu hingga terwujudnya publikasi ini diucapkan banyak terima kasih. Akhirnya kami berharap bahwa buku ini bermanfaat sebagai salah satu acuan dalam menentukan skala prioritas perencanaan program-program pembangunan.

Palu, Juli 2024

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. Simon Sapary, M.Sc.

Daftar Isi

Statistik Ketahanan Sosial Provinsi Sulawesi Tengah 2024

Volume 4, 2024

JUDUL	HAL
KATA PENGANTAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pengertian Statistik Ketahanan Sosial	2
1.3 Tujuan	3
1.4 Sumber Data	3
BAB 2 STATISTIK KETAHANAN WILAYAH	5
2.1 Sejarah Singkat Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	5
2.2 Wilayah Geografis	7
2.3 Kondisi Lingkungan Hidup	10
BAB 3 STATISTIK KETAHANAN MASYARAKAT	15
3.1 Jumlah, Kepadatan Dan Pertumbuhan Penduduk	16
3.2 Rasio Ketergantungan Dan Rasio Jenis Kelamin	18
3.3 Ketenagakerjaan	20
3.4 Pendidikan	26

JUDUL	HAL
3.5 Kesehatan	32
3.6 Sosial Budaya	37
BAB 4 STATISTIK KETAHANAN EKONOMI	39
4.1 Inflasi	39
4.2 Pertumbuhan Ekonomi	41
4.3 PDRB	44
4.4 Kemiskinan	46
4.5 Ketahanan Pangan	48
BAB 5 STATISTIK KETAHANAN POLITIK DAN KEAMANAN	51
5.1 Politik	51
5.2 Keamanan dan Ketertiban	54

Daftar Tabel

NOMOR TABEL	JUDUL	HAL
Tabel 1	Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/ Kota, 2022	9
Tabel 2	Persentase Rumah Menurut Jenis Atap Provinsi Sulawesi Tengah, 2022	12
Tabel 3	Persentase Penggunaan Sumber Air Minum, 2022	13
Tabel 4	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah, 2014-2022	17
Tabel 5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 7-12, 13-15, dan 16-18 Tahun, 2022	27
Tabel 6	Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Berumur 7-18 Tahun, 2022	28
Tabel 7	Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, 2022	29
Tabel 8	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut ijazah/STTB Tertinggi Yang Dimiliki, 2022	30
Tabel 9	Beberapa Indikator Kesehatan & Lingkungan di Provinsi Sulawesi Tengah, 2021-2022	33
Tabel 10	Persentase Penduduk Yang Pernah Mengalami Keluhan Kesehatan, 2021-2022	34

NOMOR TABEL	JUDUL	HAL
Tabel 11	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah, 2022	36
Tabel 12	Jumlah Tenaga Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah, 2021 – 2022	37
Tabel 13	Kontribusi Sektor PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tengah, 2021-2022	43
Tabel 14	PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Tengah, 2018-2022	45
Tabel 15	Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, 2022	52
Tabel 16	Jumlah Kejahatan (<i>Crime Total</i>) dan Jumlah Kejahatan yang terselesaikan (<i>Crime Cleared</i>) di Provinsi Sulawesi Tengah, 2020-2021	55
Tabel 17	Sepuluh Jenis Tindak Pidana Terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah, 2021	56

Daftar Gambar

NOMOR GAMBAR	JUDUL	HAL
Gambar 1	Piramida Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah, 2021	19
Gambar 2	Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja Sulawesi Tengah, Agustus 2020 - Agustus 2022 (Ribu Jiwa)	21
Gambar 3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Tengah, Agustus 2021 - Agustus 2022	23
Gambar 4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Tengah Menurut Tempat Tinggal, Agustus 2020 - Agustus 2022	24
Gambar 5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Sulawesi Tengah Menurut Jenis Kelamin, Agustus 2020 - Agustus 2022	25
Gambar 6	Angka Morbiditas Provinsi Sulawesi Tengah, 2021-2022	35
Gambar 7	Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Provinsi Sulawesi Tengah, 2022	38
Gambar 8	Laju Inflasi per Bulan Nasional dan Gabungan Dua Kota di Sulawesi Tengah (2018=100), 2022	40
Gambar 9	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah, 2018-2022	42
Gambar 10	Persentase Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah, 2018-2022	48
Gambar 11	Produksi Padi dan Beras di Provinsi Sulawesi Tengah, 2021-2022	49

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai respon semakin kompleksnya permasalahan sosial dalam pembangunan nasional, terutama menghadapi era globalisasi yang sedang berlangsung, dibutuhkan informasi berupa data statistik terutama di bidang sosial. Data statistik tersebut akan digunakan untuk menganalisis ketangguhan masyarakat menghadapi berbagai pengaruh yang mengancam stabilitas dan eksistensinya.

Penyediaan data statistik ketahanan sosial akan sangat bermanfaat bagi para perencana dan pembuat kebijakan dalam mendiagnosa sebab-sebab perubahan sosial yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya. Krisis multi dimensional yang sedang berlanjut serta pengaruh globalisasi yang terjadi, seperti kemajuan iptek dan perdagangan bebas diyakini mempunyai kontribusi yang berarti pada perubahan perilaku individu, keluarga dan pada gilirannya akan berpengaruh pada kondisi kehidupan masyarakat.

Pengaruh perubahan yang terjadi sedapat mungkin memberikan dampak yang positif pada kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mempertahankan nilai-nilai kehidupan yang telah disepakati dan dianut bersama, atau dengan kata lain masyarakat memiliki ketahanan

yang tangguh dalam menghadapinya. Namun diakui bahwa dalam menyikapi perubahan yang terjadi respon masyarakat berbeda antar kelompok dan daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan masyarakat akan sangat tergantung dari kondisi ekonomi, lingkungan, wawasan berpikir, kebebasan untuk menyalurkan aspirasi, politik, sosial budaya dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut perlu diterjemahkan dalam berbagai kegiatan statistik untuk mendapatkan potret ketahanan masyarakat dan trennya dari waktu ke waktu.

Publikasi Statistik Ketahanan Sosial Provinsi Sulawesi Tengah 2023 ini mencoba menjawab kebutuhan informasi statistik ketahanan sosial yang diperlukan, baik untuk kepentingan Nasional maupun Provinsi dan Kabupaten/ Kota, terutama pada era pelaksanaan otonomi daerah saat ini.

1.2 Pengertian Statistik Ketahanan Sosial

Walaupun belum ada kesepakatan tentang definisi yang pasti dari istilah ketahanan sosial, namun sebagai pendekatan, ketahanan sosial dapat diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa/masyarakat berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam, secara langsung maupun tidak langsung

membahayakan kelangsungan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Sebagai suatu fenomena yang dependen, tingkat ketahanan sosial di suatu wilayah tertentu dipengaruhi atau ditentukan oleh berbagai fenomena independen seperti keadaan komunal, sosial dan lingkungannya. Ketahanan sosial suatu wilayah berawal dari ketahanan individu. Sedangkan ketahanan individu, secara kolektif akan menunjukkan ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat dan ketahanan lingkungan.

1.3 Tujuan

Publikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi ketahanan sosial di Provinsi Sulawesi Tengah. Secara lebih detail ketahanan sosial di Provinsi Sulawesi Tengah tersebut dapat diilustrasikan dari tingkat keamanan, kehidupan politik, kondisi lingkungan hidup dan tingkat kemiskinan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

1.4 Sumber Data

Data primer dan data sekunder digunakan dalam publikasi ini. Data primer yang dikumpulkan oleh BPS diantaranya adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang digunakan untuk

menghitung tingkat kemiskinan serta *review* dokumen dan media yang digunakan untuk menyusun Indek Demokrasi Indonesia (IDI). IDI juga diperkaya dengan data *focus group discussion* untuk memverifikasi data kualitatif dari *review* media. Selain itu diambil juga sumber yang berasal dari berbagai publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Data sekunder berasal dari beberapa institusi seperti Komisi Pemilihan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Stasiun Klimatologi, dan data dari publikasi Statistik Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Tengah.

BAB 2

STATISTIK KETAHANAN WILAYAH

Ketahanan wilayah adalah situasi yang membuat masyarakat di suatu wilayah lentur dalam menghadapi berbagai ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar wilayah. Ancaman internal maupun eksternal mencakup ancaman terhadap fisik wilayah/lingkungan fisik, kehidupan sosial, ekonomi maupun budaya. Suatu wilayah disebut memiliki ketahanan jika lingkungan fisiknya mendukung, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia cukup baik dan ketahanan sosialnya juga kuat.

2.1 Sejarah Singkat Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi terbesar di pulau Sulawesi adalah Sulawesi Tengah dengan luas daratan 61.841 kilometer persegi dan wilayah laut 189.480 Kilometer persegi, terletak di bagian barat Kepulauan Maluku dan bagian selatan Provinsi Gorontalo. Secara administratif terbagi dalam dua belas kabupaten dan satu kota yakni Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten

Buol, Kabupaten Parigi Moutong serta Kota Palu. Jumlah penduduk Sulawesi Tengah 3.021.879 jiwa sesuai Proyeksi Penduduk Tahun 2015-2045

Karena letaknya yang strategis, pelabuhan–pelabuhannya menjadi tempat persinggahan kapal-kapal Portugis dan Spanyol lebih dari 500 tahun yang lampau. Pada bulan Januari 1580, pengeliling dunia Sir Francis Drake dengan kapalnya The Golden Hind pernah singgah di salah satu pulau kecil di pantai timur provinsi ini selama sebulan. Meskipun tidak ada catatan sejarah, bukti persinggahan pelaut-pelaut Portugis dan Spanyol di negeri ini masih ada seperti pada bentuk pakaian masyarakat hingga dewasa ini.

Setelah dikuasai oleh Belanda pada tahun 1905, Sulawesi Tengah dibagi menjadi beberapa kerajaan kecil dibawah kekuasaan raja-raja yang memiliki kewenangan penuh. Pemerintahan Belanda membagi Sulawesi Tengah menjadi tiga daerah yaitu wilayah barat yang dikenal dengan Kabupaten Donggala dan Buol serta Tolitoli yang berada dibawah kekuasaan Gubernur yang berkedudukan di Makassar, Sulawesi Selatan. Dibagian tengah yang membujur di kawasan timur laut yakni sebagian Donggala dan bagian selatan Poso berada dibawah pengawasan Residen di Manado, Sulawesi Utara. Sedangkan bagian timur Sulawesi Tengah terdiri atas Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan yang berada dibawah kendali Buton, Sulawesi Tenggara.

Pada Tahun 1919, raja-raja yang masih berkuasa dibawah pemerintahan Belanda menandatangani suatu perjanjian yang disebut

Korte Verklaring Renewcame. Perjanjian ini untuk memperbarui perjanjian mereka dimana seluruh daerah Sulawesi Tengah dipercayakan kepada kekuasaan residen Sulawesi Utara.

Setelah perang dunia II, Provinsi Sulawesi Tengah dibagi menjadi beberapa bagian dan sub-bagian. Pada tanggal 13 April 1964 terbentuk Provinsi Sulawesi Tengah, dan sejak saat itu memiliki pemerintahan sendiri dan hingga kini tanggal 13 April diperingati sebagai lahirnya Provinsi Sulawesi Tengah.

2.2 Wilayah Geografis

Sulawesi merupakan pulau terbesar ke-5 di Indonesia setelah Papua, Kalimantan dan Sumatra dengan luas daratan 227.654 km². Bentuk unik menyerupai huruf K yang membujur dari utara ke selatan dan tiga semenanjung yang membujur ke timur laut, timur dan tenggara. Pulau ini dibatasi oleh Selat Makassar di bagian barat yang menjadikannya terpisah dari Kalimantan serta dipisahkan dari Kepulauan Maluku oleh Laut Maluku.

Secara astronomis, Sulawesi Tengah terletak antara 2°22' Lintang Utara dan 30°48' Lintang Selatan dan antara 119° 22'–124°22' Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki batas-batas: Utara-Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo; Selatan-Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan; Barat-Selat

Makassar; Timur-Provinsi Maluku Utara.

Sulawesi Tengah merupakan provinsi terbesar dengan luas wilayah daratan 61.841 km² yang mencakup semenanjung bagian timur dan sebagian semenanjung bagian utara serta Kepulauan Togean di Teluk Tomini dan pulau-pulau di Banggai Kepulauan di Teluk Tolo. Luas wilayah laut mencapai 189.480 km². Sulawesi Tengah Terdiri dari 12 Kabupaten dan 1 Kota.

Hampir semua bagian provinsi ini bergunung-gunung (kira-kira 42,80% di atas ketinggian 500 MDPL) dan puncak tertinggi adalah Gunung Nokilalaki yang mencapai 2.610 MDPL. Selain gunung, Sulawesi Tengah memiliki beberapa sungai diantaranya Sungai Lariang, Sungai Gumbasa, dan Sungai Palu. Juga terdapat danau yang menjadi obyek wisata terkenal yakni Danau Poso dan Danau Lindu.

Sulawesi Tengah memiliki beberapa kawasan konservasi seperti suaka alam, suaka margasatwa dan hutan lindung yang memiliki keunikan flora dan fauna unik sekaligus menjadi obyek penelitian bagi para ilmuwan dan naturalis. Ibukota Sulawesi Tengah adalah Kota Palu yang terletak di Teluk Palu.

Tabel 1 Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota,
2022

Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Luas (km ²)
(1)	(2)	(3)
1. Banggai Kepulauan	Salakan	2 488,79
2. Banggai	Luwuk	9 672,70
3. Morowali	Bungku	3 037,04
4. Poso	Poso Kota	7 112,25
5. Donggala	Banawa	4 275,08
6. Tolitoli	Baolan	4 079,77
7. Buol	Biau	4 043,57
8. Parigi Moutong	Parigi	5 089,91
9. Tojo Una-una	Ampana	5 721,15
10. Sigi	Bora	5 196,02
11. Banggai Laut	Banggai	725,67
12. Morowali Utara	Kolonodale	10 004,28
13. Palu	Palu	395,06
Sulawesi Tengah		61 841,29

Sumber: Peraturan Mendagri Nomor 72 tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019

Garis khatulistiwa yang melintasi semenanjung bagian utara di Sulawesi Tengah membuat iklim daerah ini tropis. Akan tetapi berbeda dengan Jawa dan Bali serta sebagian pulau Sumatra, musim hujan di Sulawesi Tengah terjadi antara bulan April dan September sedangkan musim kemarau antara Oktober hingga Maret. Rata-rata curah hujan berkisar antara 900 sampai 1.000 milimeter pertahun yang termasuk curah hujan terendah di Indonesia.

Temperatur pada tahun 2021 berkisar antara 19,6 sampai 36,0 derajat Celcius untuk dataran dan pantai dengan tingkat kelembaban antara 41% sampai 100%.

2.3 Kondisi Lingkungan Hidup

Keselarsan pengelolaan lingkungan hidup dengan pembangunan merupakan jalan terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, yang secara langsung akan berpengaruh terhadap ketahanan wilayah/ sosial. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain.

Dengan pengertian seperti itu maka informasi lingkungan hidup ke dalam komponen-komponennya yang lebih kecil, serta analisis yang akurat terhadap lingkungan hidup tersebut, akan menjadi sangat penting. Oleh sebab itu lingkungan sosial yang dianggap merupakan bagian dari lingkungan hidup adalah wilayah tempat berlangsungnya

bermacam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok dengan simbol dan nilai serta norma yang sudah mapan, serta terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan buatan (tata ruang).

Selain mencermati dari sisi tata ruang, kualitas dan fasilitas perumahan menjadi salah satu faktor yang ikut berpengaruh terhadap ketahanan wilayah/sosial masyarakatnya. Pada tahun 2023, 88,44 persen rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tengah menempati tempat tinggal dengan status milik sendiri. Kemudian rumah tangga dengan status mengontrak/sewa 3,39 persen, dan sisanya dengan status lainnya sebesar 8,17 persen.

Atap rumah merupakan salah satu unsur rumah yang sangat vital. Tidak saja berfungsi sebagai pelindung terhadap panas matahari dan hujan, atap rumah menurut jenisnya juga berpengaruh pada kesehatan bagi penghuninya. Pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 91,69 persen rumah beratapkan seng, kemudian 2,96 persen beratapkan ijuk, dan sisanya beratapkan beton/genteng/dan lainnya.

Tabel 2 Persentase Rumah Menurut Jenis Atap Provinsi Sulawesi Tengah,

2023

Jenis Atap	Persentase
(1)	(2)
1. Beton	0,56
2. Genteng	3,41
3. Bambu/Kayu/Sirap	0,37
4. Seng	91,69
5. Asbes	0,94
6. Jerami/Ijuk/Daun/Rumbia	2,96
7. Lainnya	0,06

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Fasilitas air bersih merupakan salah satu indikator ketahanan lingkungan. Pada tahun 2023 sumber air minum yang digunakan rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tengah yang menggunakan Air Kemasan baik bermerk maupun tidak bermerk adalah sebesar 42,20 persen sedangkan sisanya menggunakan sumber air leding, pompa, air dalam kemasan, dan lain lain.

Tabel 3 Persentase Penggunaan Sumber Air Minum, 2023

Sumber Air Minum	Persentase
(1)	(2)
1. Air Kemasan Bermerk, Air Isi Ulang	0,56
2. Leding	3,41
3. Sumur Bor/Pompa	0,37
4. Sumur Terlindung, Sumur Tak terlindung	91,69
5. Mata Air Terlindung/Mata Air Tak terlindung	0,94
6. Air Permukaan, Air Hujan, Lainnya	2,96

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

BAB 3

STATISTIK KETAHANAN MASYARAKAT

Ketahanan masyarakat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan ketahanan sosial, karena masyarakat adalah makhluk sosial sehingga interaksi di dalam masyarakat merupakan salah satu proses sosial. Faktor manusia menjadi penentu dalam hal ketahanan sosial, karena manusia bukan saja sebagai obyek atau sasaran namun sekaligus juga sebagai subyek atau pelaksana pembangunan. Dengan demikian kondisi sumber daya manusia menjadi salah satu tolok ukur dalam melihat sampai seberapa jauh ketahanan sosial bisa dilihat. Atas dasar pemikiran tersebut, pembangunan dititik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Kualitas sumber daya manusia diperlukan karena jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal atau aset pembangunan jika kualitasnya baik. Sebaliknya, hanya akan menjadi beban manakala kualitasnya rendah.

3.1 Jumlah, Kepadatan Dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah proyeksi penduduk Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 tercatat sebesar 3.086.750 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak, terdapat di Kabupaten Parigi Moutong dengan penduduk sebesar 454.700 jiwa, kemudian Kota Palu sebesar 387.490 Jiwa, diikuti oleh Kabupaten Banggai sebesar 373.690 Jiwa.

Meskipun dari tahun ke tahun jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah diproyeksikan terus bertambah akan tetapi laju pertumbuhan penduduk selama delapan tahun terakhir menunjukkan kecenderungan melambat. Pada Tahun 2015, Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 1,60 persen dan pada Tahun 2023 sebesar 1,13 persen. Seiring bertambahnya jumlah penduduk tersebut, Sulawesi Tengah diprediksikan akan mengalami Bonus Demografi.

Potensi permasalahan jumlah penduduk yang besar dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang dimiliki. Bila jumlah penduduk besar sedangkan tingkat pertumbuhannya tinggi, maka beban untuk mencukupi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya menjadi sangat berat, sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan ketahanan wilayah/sosialnya. Oleh karena itu, Sulawesi Tengah sedang menuju ke arah yang lebih baik.

Tabel 4 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah,
2015-2023

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Pertumbuhan Penduduk
(1)	(2)	(3)
2015	2.876,69	1,6
2016	2.921,72	1,57
2017	2.966,32	1,53
2018	3.010,44	1,49
2019	3.054,02	1,45
2020	2.985,73	1,22
2021	3.021,88	1,62
2022	3.066,14	1,53
2023	3.086,75	1,13

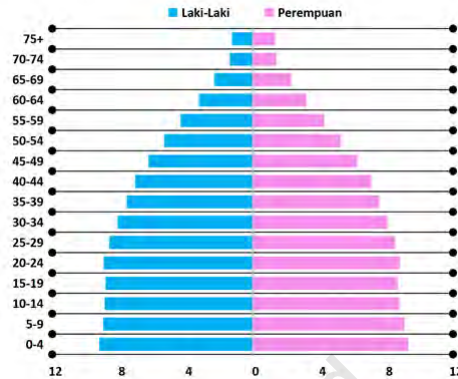
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

3.2 Rasio Ketergantungan Dan Rasio Jenis Kelamin

Selain jumlah, kepadatan maupun pertumbuhan penduduk, hal lain yang perlu diketahui adalah komposisi penduduk, antara lain komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Dikatakan penting karena kejadian demografis maupun karakteristiknya berbeda menurut umur dan jenis kelamin baik untuk kelahiran, kematian maupun perpindahan penduduk. Kelahiran menurut jenis kelamin jelas berbeda, pada saat dilahirkan umumnya jumlah bayi pria lebih banyak dari bayi wanita. Dari kedua variabel tersebut, yaitu umur dan jenis kelamin akan dapat dihitung indikator Rasio Ketergantungan dan Rasio Jenis Kelamin, dimana kedua indikator tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi ketahanan wilayah/sosial dari suatu wilayah kota dan atau dalam satu rumahtangga

Rasio Ketergantungan merupakan perbandingan antar jumlah penduduk yang produktif (15 – 64 tahun) dengan yang tidak produktif (0 – 14 tahun dan 65 tahun keatas). Rasio Ketergantungan memberikan gambaran seberapa jauh penduduk yang berusia produktif/aktif secara ekonomi harus menanggung penduduk yang belum produktif dan pasca produktif. Untuk penduduk yang mempunyai struktur muda atau sangat tua sekali, maka beban ketergantungannya sangat tinggi. Di negara-negara berkembang karena struktur umur penduduknya muda, maka Rasio Ketergantungan biasanya relatif tinggi.

Gambar 1 Piramida Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah, 2023



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Rasio Ketergantungan untuk Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 sebesar 46,77 persen, sedangkan Rasio Ketergantungan penduduk usia muda sebesar 38,87 persen dan Rasio Ketergantungan penduduk usia tua sebesar 9,31 persen.

Selain menurut umur, komposisi penduduk juga dapat dilihat menurut jenis kelamin. Perbandingan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan akan menghasilkan suatu ukuran yang disebut dengan rasio jenis kelamin (sex ratio). Dari 3.086.750 jiwa penduduk Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023, sebanyak 1.583.640 jiwa diantaranya adalah penduduk laki-laki dan 1.503.110 jiwa penduduk perempuan. Dengan demikian rasio jenis kelamin yang merupakan perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 105,4, yang artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 hingga 106 penduduk laki-laki.

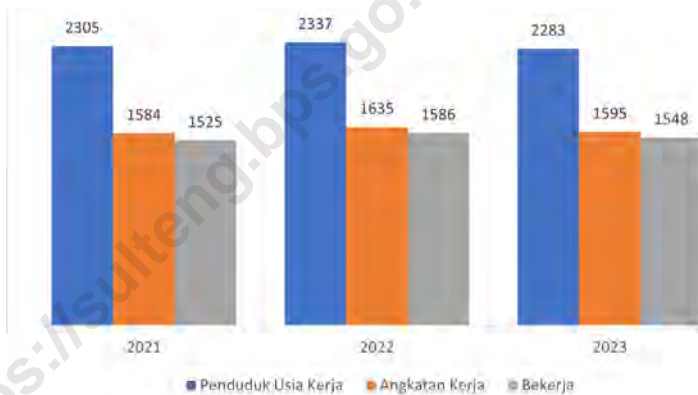
3.3 Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan juga merupakan salah satu hal yang mempunyai pengaruh terhadap ketahanan sosial. Misalnya tingginya tingkat pengangguran di suatu wilayah akan memberikan dorongan yang kuat (potensi) bagi munculnya berbagai ketidakpuasan atas beragam kebijakan pembangunan (terutama dibidang ekonomi), yang kemudian dapat memicu terjadinya konflik antar berbagai pihak, baik pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan pengusaha, dan antar masyarakat sendiri. Frekuensi konflik yang timbul dan eskalasinya menunjukkan/mengindikasikan seberapa kuatnya ketahanan wilayah/ sosial masyarakat yang ada. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang dapat dianggap paling relevan (terutama bagi indikator penyebab/ input) dalam menggambarkan kondisi ketahanan wilayah/ sosial, khususnya di bidang ketenagakerjaan.

Keadaan ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah bulan Agustus 2023 menunjukkan peningkatan jumlah penduduk usia kerja. Jumlah penduduk usia kerja pada Agustus 2022 sebesar 2.363,6 ribu jiwa menurun menjadi 2.277,0 ribu jiwa pada Agustus 2023. Penurunan jumlah penduduk usia kerja, juga diikuti dengan menurunnya jumlah angkatan kerja. Pada Agustus 2023, jumlah angkatan kerja menurun sebesar 41,22 ribu jiwa yaitu dari 1.635,5 ribu jiwa pada Agustus 2022 menjadi 1.594,2 ribu jiwa pada Agustus 2022. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah penduduk yang bekerja. Penduduk bekerja

juga mengalami penurunan yaitu pada Agustus 2022 penduduk bekerja berjumlah 11.586,3 ribu jiwa menurun menjadi 1.547,2 ribu jiwa pada Agustus 2023. Kegiatan produksi yang menurun dibandingkan dengan tahun 2022 menjadi salah satu alasan menurunnya jumlah tenaga kerja pada Agustus 2023. Jika dibandingkan dengan 2 tahun kebelakang polanya juga masih sama baik untuk penduduk usia kerja, angkatan kerja, dan penduduk bekerja yang meningkat jumlahnya.

Gambar 2 Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja Sulawesi Tengah, Agustus 2021 - Agustus 2023 (Ribu Jiwa)



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat, sejalan dengan jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan. Pada Agustus 2022 TPAK sebesar 69,99 persen menurun menjadi 69,85 persen pada Agustus 2023. Pada tahun 2023, peningkatan TPAK terjadi karena jumlah penduduk angkatan kerja meningkat.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan, dari 3,00 persen pada Agustus 2022 turun menjadi 2,95 persen pada Agustus 2023. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Dibandingkan dengan Agustus 2020, TPAK masih lebih tinggi pada Tahun 2022, namun berbanding terbalik dengan TPT yang lebih rendah pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2020.

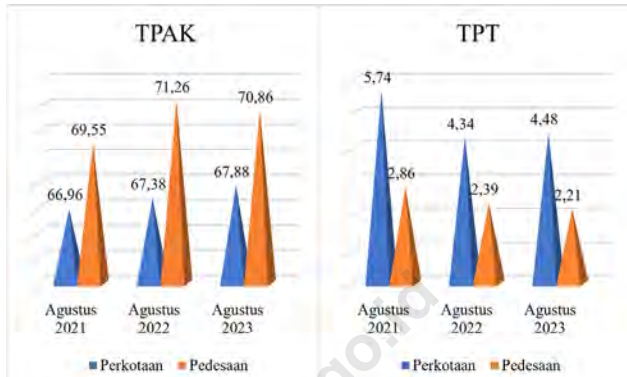
Gambar 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Tengah, Agustus 2021 - Agustus 2023



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah sebagian besar banyak tinggal di daerah pedesaan, sehingga merupakan hal yang wajar jika penduduk usia kerja dan angkatan kerja di pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Hal ini juga mempengaruhi TPAK di pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Berbeda halnya dengan TPAK, TPT di pedesaan lebih rendah dibanding di perkotaan. Hal ini dikarenakan rata-rata penduduk di pedesaan bergerak di sektor pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja, seperti saat Agustus 2023 sedang adanya musim panen tanaman padi dan juga perkebunan sehingga banyak menyerap tenaga kerja.

Gambar 4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Tengah Menurut Tempat Tinggal, Agustus 2021 - Agustus 2023



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

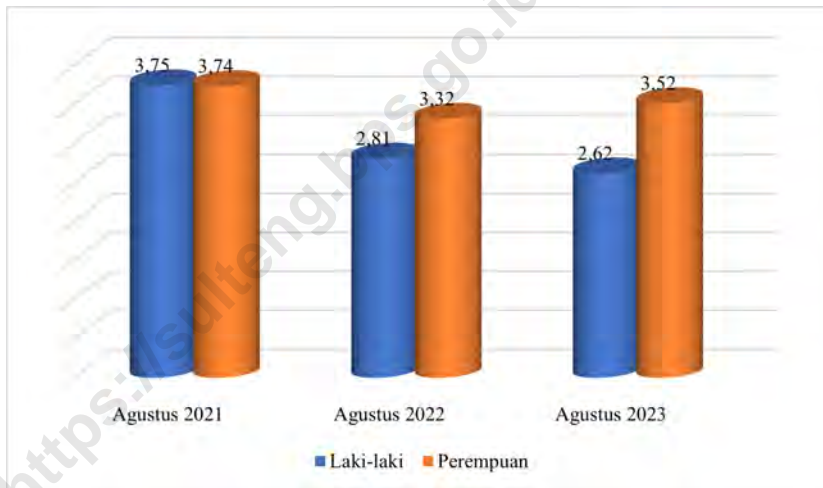
Bias gender masih sangat terlihat pada bidang ketenagakerjaan. Perempuan yang aktif secara ekonomi masih sangat sedikit jumlahnya dibanding laki-laki. Hal ini terlihat dari TPAK perempuan yang sebesar 54,39 persen, lebih sedikit dari TPAK laki-laki yang sebesar 85,62 persen pada Agustus 2023. Posisi laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah menjadikan laki-laki lebih aktif secara ekonomi dibanding perempuan.

Selama kurun waktu satu tahun (Agustus 2022 - Agustus 2023), TPT perempuan mengalami perubahan posisi yang sebelumnya lebih rendah menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan TPT laki-laki. Pada Agustus 2023 TPT perempuan turun dari 3,32 pada Agustus 2022 menjadi 3,52 pada Agustus 2023, Pola perubahan TPT laki-laki juga mengalami penurunan dari 2,81 pada Agustus 2022 menjadi 2,62 pada

Agustus 2023.

Dalam rangka mendukung kesetaraan gender, kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan mulai menunjukkan adanya kesamaan dalam pemberian kesempatan kerja, karena pekerjaan yang identik dengan laki-laki pun dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan dan begitu juga sebaliknya.

Gambar 5 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Sulawesi Tengah Menurut Jenis Kelamin, Agustus 2021 - Agustus 2023



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

3.4 Pendidikan

Kondisi sumber daya manusia di bidang pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang ikut berpengaruh terhadap ketahanan wilayah/ sosial masyarakatnya. Sebagai contoh semakin lama penduduk/anggota masyarakat menuntut ilmu/sekolah, semakin tinggi pemahamannya akan unsur kehidupan yang ada, sehingga diharapkan semakin arif dan bijaksana mereka hidup antar sesama. Dengan asumsi bahwa semakin lama penduduk suatu wilayah memperoleh pendidikan/bersekolah, ketahanan wilayah/sosialnya relatif semakin baik, maka indikator pendidikan yang dianggap relevan dengan ketahanan sosial adalah Angka Partisipasi Sekolah, baik itu Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM), kemudian Angka Buta Huruf, dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.

Indikator partisipasi sekolah termasuk dalam indikator proses yang dalam pembahasan disini diantaranya adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sedangkan APM adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Tabel 5 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 7-12, 13-15, dan 16-18 Tahun, 2023

Kabupaten/Kota	APS	APS	APS
	7-12	13-15	16-18
(1)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	98,26	92,19	76,02
2. Banggai	98,88	94,18	67,33
3. Morowali	96,86	95,01	89,15
4. Poso	98,95	94,97	83,26
5. Donggala	97,98	93,11	69,91
6. Toli Toli	96,46	90,74	76,78
7. Buol	98,95	93,47	76,26
8. Parigi Moutong	97,52	91,01	65,61
9. Tojo Una Una	99,33	94,72	70,99
10. Sigi	98,73	92,62	74,07
11. Banggai Laut	98,71	87,94	72,41
12. Morowali Utara	97,87	93,82	83,3
13. Palu	99,79	95,33	90,03
Sulawesi Tengah	98,34	93,13	76,29

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 6 Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Berumur 7-18 Tahun,
2022

Kabupaten/Kota	APM	APM	APM
	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
Banggai Kepulauan	98,26	70,65	63,16
Banggai	91,85	72,02	60,32
Morowali	93,69	74,53	79,34
Poso	93,96	81,96	75,46
Donggala	93,21	79,78	57,08
Tolitoli	90,36	67,33	67,14
Buol	97,48	77,21	63,14
Parigi Moutong	92,06	78,5	60,78
Tojo Una-Una	97,12	76,66	59,34
Sigi	94,09	73,7	53,84
Banggai Laut	96,45	71,9	63,29
Morowali Utara	93,46	79,7	72,65
Kota Palu	91,13	84,06	78,44
Sulawesi Tengah	98,34	93,13	76,29

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 7 Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, 2022.

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI	2.926	307.722	24.330	12,65
SMP/MTS	868	117.017	10.884	10,75
SMA/SMK/MA	414	122.568	9.320	13,15

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Secara umum, ketahanan sosial masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah di bidang pendidikan relatif baik. Rasio Murid Guru di Provinsi Sulawesi Tengah untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 12,65 yang berarti satu orang guru rata-rata mengajar 12-13 murid, sedangkan tingkat SMP/MTs secara rata-rata seorang guru menangani 10-11 murid dan tingkat SMA/SMK/MA secara rata-rata seorang guru menangani 13-14 murid.

Kualitas sumber daya manusia secara spesifik dapat dilihat pada tingkat pendidikan yang ditamatkan. Pada tahun 2023 persentase penduduk umur 15 tahun keatas yang berpendidikan SLTP keatas telah mencapai 61,02 persen, meningkat bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2022 sebesar 60,43 persen. Indikator ini juga sering digunakan

dalam menghitung angka Indeks Pembangunan Manusia yang didekati dengan rata-rata lama sekolah.

Tabel 8 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut ijazah/
STTB Tertinggi Yang Dimiliki, 2023

Kabupaten/Kota	Tidak Mempunyai Ijazah	SD/MI/Paket A/SPM/PDF	SMP/MTs/Paket B/SPM/PDF
		Ula/SDLB	Wustha/SMPLB
(1)	(2)	(3)	(4)
Banggai Kepulauan	8,14	37,22	23,48
Banggai	9,83	28,44	29,05
Morowali	8,57	28,63	28,93
Poso	7,37	26,11	27,47
Donggala	12,65	38,74	22,88
Tolitoli	12,46	28,38	22,71
Buol	10,22	29,39	27,24
Parigi Moutong	15,03	31,48	23,73
Tojo Una-Una	10,09	35,33	23,94
Sigi	8,42	32,98	23,12
Banggai Laut	10,07	38,63	22,31
Morowali Utara	7,87	29,91	27,73
Kota Palu	3,74	14,1	25,26
Sulawesi Tengah	9,83	29,15	25,26

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 8 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut ijazah/
STTB Tertinggi Yang Dimiliki, 2023 (lanjutan)

Kabupaten/Kota	SMA/SMK/MA/Paket	
	C/SPM/ SMLB/MAK	PDF Ulya/ Perguruan Tinggi
(1)	(5)	(6)
1. Banggai Kepulauan	18,8	12,37
2. Banggai	22,43	10,24
3. Morowali	25,14	8,73
4. Poso	27,98	11,07
5. Donggala	18,99	6,74
6. Toli Toli	25,1	11,34
7. Buol	19,96	13,2
8. Parigi Moutong	19,76	10
9. Tojo Una Una	19,4	11,23
10. Sigi	22,15	13,34
11. Banggai Laut	18,38	10,61
12. Morowali Utara	25,52	8,97
13. Palu	34,79	22,1
Sulawesi Tengah	23,74	12,02

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

3.5 Kesehatan

Kondisi sumber daya manusia di bidang kesehatan juga ikut andil dalam melihat kondisi ketahanan wilayah/sosial penduduk di suatu wilayah tertentu. Keadaan kesehatan penduduk pada suatu saat dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang status kesehatan penduduk pada umumnya. Kondisi kesehatan yang dalam hal ini diwakili dengan indikator angka kesakitan merupakan resultan dari berbagai aspek/kondisi yang dirasakan/dialami oleh masyarakatnya secara umum, yang dengan demikian dapat menjadi salah satu indikator yang baik untuk menggambarkan kondisi ketahanan wilayah/sosialnya.

Kesehatan merupakan salah satu komponen yang dapat mengukur kualitas hidup manusia. Semakin baik tingkat kesehatan manusia maka akan semakin baik pula kualitas hidupnya. Salah satu wujud keberhasilan pembangunan bidang kesehatan yaitu ditandai dengan penduduk yang hidup dengan perilaku dan berada dalam lingkungan yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, dan memiliki tingkat kesehatan yang baik.

Tabel 9 Beberapa Indikator Kesehatan & Lingkungan di Provinsi Sulawesi Tengah, 2022 – 2023

Indikator Kesehatan dan Lingkungan	Tahun	
	2022 (%)	2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan	21,93	20,81
Persentase Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	15,18	10,07
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Rumah dengan Lantai Terluas Tanah	1,42	1,66

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Pada tahun 2023 di Provinsi Sulawesi Tengah setidaknya terdapat 21,81 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya dengan nilai 21,93 persen. Pada Tahun 2023 status kesehatan penduduk tergambar dari persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan yang mencapai 20,81 persen di Tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 21 persen penduduk Provinsi Sulawesi Tengah pernah mengalami keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan tersebut meliputi beberapa penyakit antara lain: panas, batuk, pilek, asma/sesak nafas, diare/buang-buang air, sakit kepala berulang, sakit gigi, dan lainnya.

Tabel 10 Persentase Penduduk Yang Pernah Mengalami Keluhan Kesehatan,
2022-2023

Jenis Kelamin	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	21,00%	19,77%
Perempuan	22,90%	21,87%
Laki-laki + Perempuan	21,93%	20,81%

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel di atas memperlihatkan bahwa secara umum jumlah penduduk yang memiliki keluhan kesehatan di tahun 2023 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan untuk Penduduk dengan jenis kelamin perempuan sebesar 1,03 persen lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki yaitu sebesar 1,23 persen.

Banyak hal dapat dilihat untuk dapat mengetahui tingkat kesehatan di suatu wilayah, salah satunya yaitu dengan morbiditas. Morbiditas adalah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Penduduk yang memiliki keluhan kesehatan belum tentu terganggu aktifitas sehari-harinya.

Di tahun 2022 angka morbiditas laki laki sekitar 12,43 persen dan 13,54 persen untuk perempuan. Sedangkan di tahun 2023, angka

morbiditas untuk laki laki sekitar 9,54 persen dan 10,48 persen untuk perempuan. Terjadi penurunan angka morbiditas pada kelompok perempuan dan laki-laki dari tahun sebelumnya, dan secara total, angka morbiditas di Tahun 2023 secara umum lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 6 Angka Morbiditas Provinsi Sulawesi Tengah, 2022-2023



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Pembangunan bidang kesehatan selain dari faktor lingkungan, hal lain juga perlu diperhatikan adalah fasilitas dan sarana kesehatan. Ketersediaan sarana dan fasilitas kesehatan juga harus diupayakan dengan mutu dan kualitas yang baik. Tidak hanya dari sisi ketersediaan, kemudahan akses dan keterjangkauannya juga harus diupayakan agar adil dan merata.

Di Sulawesi Tengah hingga tahun 2023, seluruh kabupaten/

kota sudah memiliki fasilitas rumah sakit. Jumlah rumah sakit umum di Sulawesi Tengah sebanyak 40 unit. Selain rumah sakit umum dan rumah bersalin, terdapat pula puskesmas, klinik dan posyandu untuk menjangkau masyarakat di level kecamatan dan desa. Di Sulawesi Tengah, jumlah puskesmas sebanyak 218 unit. Dengan jumlah kecamatan yang sebanyak 176 menunjukkan bahwa setidaknya dalam satu kecamatan sudah terdapat minimal satu puskesmas. Ketersediaan fasilitas kesehatan posyandu ini tentu saja akan membantu menjangkau masyarakat hingga level desa. Dengan demikian, diharapkan akses terhadap fasilitas kesehatan ini semakin mudah diakses oleh seluruh masyarakat di berbagai wilayah.

Tabel 11 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah, 2023

Jenis Fasilitas Kesehatan	2023
(1)	(2)
Rumah Sakit Umum	40
Puskesmas	215
Posyandu	3.528

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Selain ketersediaan fasilitas kesehatan, jaminan kesehatan juga harus didukung oleh tenaga medis yang memadai. Di Sulawesi Tengah pada tahun 2022 jumlah dokter sebanyak 959 orang, perawat 8.709 orang, dan bidan 6.541 orang. Selanjutnya, jumlah tenaga farmasi sebanyak 1.329 orang, dan ahli gizi sebanyak 584 orang.

Tabel 12 Jumlah Tenaga Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah, 2021 – 2022

Jumlah Tenaga Kesehatan	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Dokter	1 615	959
Perawat	4 257	8 709
Bidan	5 736	6 541
Farmasi	1 067	1 329
Ahli Gizi	472	584

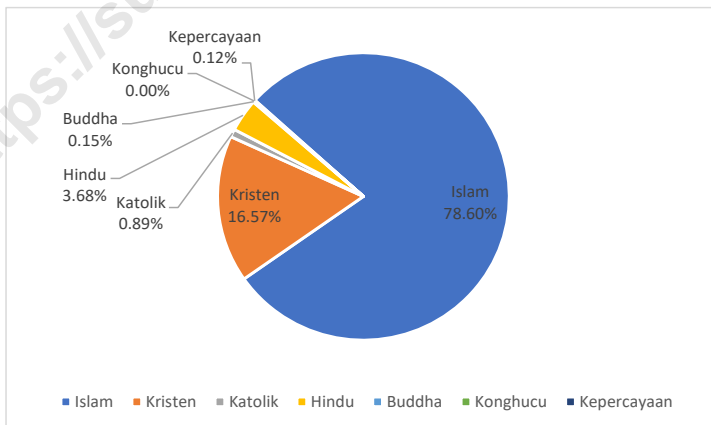
Sumber: Kementerian Kesehatan, <http://sisdmk.kemkes.go.id>

3.6 Sosial Budaya

Dalam kurun waktu sejarah telah tercatat bahwa Provinsi Sulawesi Tengah telah mampu berkembang sebagai transformasi budaya, baik yang bersifat religi, tradisi, teknologi maupun aspirasi yang semuanya itu merupakan daya penggerak yang sangat besar nilainya dalam memberi corak serta memperkaya kebudayaan, kepribadian dan kebanggaan daerah yang pada gilirannya akan mempengaruhi ketahanan wilayah/ sosial masyarakatnya. Nilai-nilai agama yang universal dan abadi sifatnya merupakan salah satu aspek bagi kehidupan dan kebudayaan bangsa. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki iklim yang kondusif bagi perkembangan berbagai ragam agama, khususnya dalam hal toleransi antar umat beragama.

Dari berbagai agama yang ada, data Kementerian Agama menunjukkan sebagian besar penduduk Provinsi Sulawesi Tengah memeluk Agama Islam 2.450.867 penduduk atau 79,07 persen, kemudian yang memeluk Agama Kristen sebesar 501.481 orang atau 16,18 persen, Agama Katolik sebesar 28.286 orang atau 0,91 persen, Agama Hindu sebanyak 111.523 orang atau 3,60 persen, Agama Budha sebesar 4.213 orang atau 0,14 persen, Agama Konghucu sebanyak 23 orang, dan penganut kepercayaan sebesar 3.324 orang atau 0,11 persen. Keberagaman ini diakomodir dengan penyediaan fasilitas tempat ibadah dimana jumlah masjid di Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2023 ada sebanyak 3.987 unit. Sedangkan untuk jumlah gereja Kristen sebanyak 2.131 unit dan gereja katolik sebanyak 177 unit untuk vihara/klenteng/pura ada sebanyak 498 unit.

Gambar 7 Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Provinsi Sulawesi Tengah, 2023



Sumber : Kemenag 2023

BAB 4

STATISTIK KETAHANAN EKONOMI

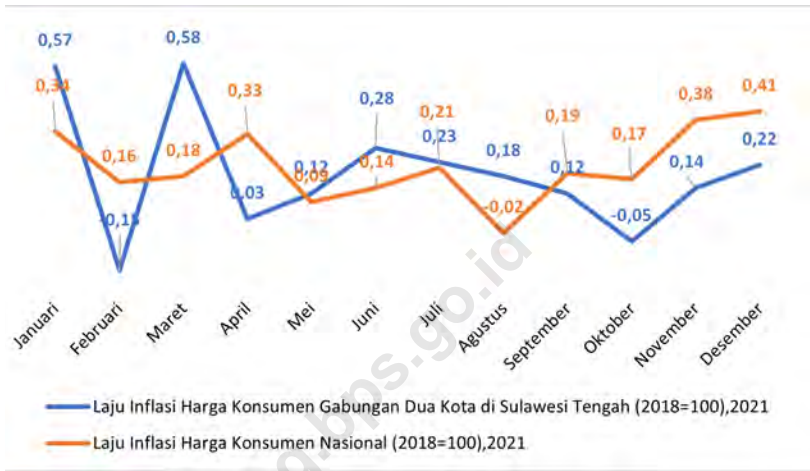
Kondisi perekonomian sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap ketahanan wilayah/sosial masyarakat yang ada didalamnya. Kondisi perekonomian yang dimaksud adalah kondisi yang mencerminkan stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita serta kemiskinan. Keempat hal tersebut dimanifestasikan dengan beberapa indikator yang relevan, diantaranya untuk stabilitas ekonomi diwakili dengan angka inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi dilihat dengan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) termasuk didalamnya pendapatan perkapita dan jumlah rumah tangga miskin yang mencerminkan ketahanan sosial dari masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

4.1 Inflasi

Tingkat inflasi merupakan sisi lain untuk melihat kondisi perekonomian. Perubahan harga yang terjadi dari waktu ke waktu menunjukkan stabilitas ekonomi suatu wilayah. Tingkat inflasi yang tinggi dan tak terkendali akan merugikan perekonomian suatu negara, yang pada akhirnya menimbulkan kesulitan ekonomi bagi rakyat secara keseluruhan, dan pada gilirannya akan berpengaruh terhadap

kondisi ketahanan wilayah/sosial masyarakatnya.

Gambar 8 Laju Inflasi per Bulan Nasional dan Gabungan Dua Kota di Sulawesi Tengah (2018=100), 2022



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2023 gabungan dua kota di Sulawesi Tengah secara umum lebih tinggi apabila dibandingkan angka inflasi nasional, tercatat pada bulan desember sebesar 0,22 persen untuk inflasi gabungan dua kota di Sulawesi Tengah dan 0,41 persen untuk angka inflasi nasional. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, inflasi gabungan dua kota di Sulawesi Tengah tahun 2023 lebih rendah, dengan inflasi tahun 2022 sebesar 0,80 persen. Sedangkan inflasi nasional tahun 2023 lebih rendah jika dibandingkan tahun 2022, inflasi nasional 2022 adalah sebesar 0,66 persen.

Selama tahun 2023 inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari dan Maret yaitu sebesar 0,57 persen dan 0,58 persen. Sedangkan di bulan Februari dan Oktober, gabungan dua kota di Sulawesi Tengah mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,15 dan 0,05 persen. Secara umum dalam hal kestabilan harga gabungan dua kota di Sulawesi Tengah bisa dikatakan cukup baik, sehingga dapat berpengaruh positif terhadap stabilitas perekonomian yang tentu saja berpengaruh terhadap ketahanan sosial dari masyarakatnya.

4.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan pembagian pendapatan masyarakat dan meningkatkan hubungan ekonomi regional. Dengan demikian arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang kondisi perekonomian suatu daerah dapat dilihat melalui neraca ekonominya. Neraca ekonomi regional bertujuan memberikan suatu gambaran statistik mengenai kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan perangkat pokok dalam neraca ekonomi regional. Secara lebih kongkret neraca ekonomi regional pada umumnya berhubungan

dengan masalah-masalah ekonomi yang dapat diukur atau dinilai dalam bentuk uang, antara lain mengenai tingkat produksi, nilai tambah dan agregat ekonomi makro lainnya yang memperoleh hasil kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah.

Kemajuan ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun belum menunjukkan perubahan yang nyata (riil). Disamping karena terjadinya peningkatan produksi secara fisik, juga karena dipengaruhi oleh kenaikan tingkat harga atau inflasi. Untuk mengetahui laju pertumbuhan secara nyata pengaruh inflasi harus dihilangkan. Oleh karena itu PDRB diestimasi dengan menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada suatu tahun dasar yang telah ditetapkan (tahun 2010). Dengan cara ini maka dapat diperkirakan laju pertumbuhan perekonomian setiap tahun atau selama periode tertentu.

Gambar 9 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah, 2010-2023



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Pada gambar diatas, terlihat sampai dengan tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah senantiasa mengalami fluktuasi dalam 5 tahun terakhir, sampai dengan tahun 2023 pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan dari 7,15 persen di tahun 2019 menjadi 13,06 persen di tahun 2023. Peningkatan tertinggi dari tahun 2018 sampai tahun 2022 terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 6,84 persen.

Tabel 13 Kontribusi Sektor PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tengah, 2022-2023

Kategori	Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan	
		2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,82	14,78	18,33	15,47
B	Pertambangan dan Penggalian	15,37	15,59	17,30	17,50
C	Industri Pengolahan	40,28	42,23	32,78	39,57
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,02	0,02	0,03	0,03
E	Pengadaan Air	0,07	0,07	0,09	0,08
F	Konstruksi	8,41	7,74	8,78	7,24
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	5,71	5,59	6,24	5,53
H	Transportasi dan Pergudangan	2,07	2,15	2,15	1,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,3	0,31	0,34	0,32
J	Informasi dan Komunikasi	2,15	2,14	3,19	2,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,42	1,41	1,55	1,42
L	Real Estate	1,02	1,14	1,23	1,14

Kategori	Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan	
		2022	2023	2022	2023
M,N	Jasa Perusahaan	0,14	0,14	0,16	0,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,76	3,24	3,96	3,09
P	Jasa Pendidikan	2,03	1,98	2,31	2,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,96	0,97	1,03	0,93
R,S,T	Jasa lainnya	0,47	0,49	0,53	0,50
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Gambaran lebih jauh struktur perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat berdasarkan dari peranan masing-masing sektor terhadap pembentukan total PDRB Provinsi Sulawesi Tengah, Sektor Primer yang terdiri dari sektor pertanian dan pertambangan dan penggalan adalah sebagai penyedia kebutuhan dasar memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tengah. Sektor yang memiliki kontribusi terkecil pada PDRB Sulawesi Tengah adalah sektor Pengadaan Listrik, Gas, Pengadaan Air dan Jasa Perusahaan.

4.3 PDRB

Apabila angka PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun diperoleh rata-rata produk yang dihasilkan atau

pendapatan yang dibayarkan setiap penduduk daerah tersebut, Rata-rata ini disebut sebagai PDRB kapita, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, Bila pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 45.157.280,- kemudian pada Tahun 2023 telah mencapai Rp. 105.548.013,- berarti telah terjadi peningkatan sekitar 81% dalam kurun waktu 5 tahun tersebut.

Tabel 14 PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Tengah, 2019-2022

Tahun	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan
(1)	(2)	(3)
2019	61,06	42,06
2020	66,31	45,05
2021	81,85	49,59
2022	105,55	56,29

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Memang disadari bahwa pendapatan perkapita belum mencerminkan pendapat penduduk yang sebenarnya, karena hanya menunjukkan kemampuan ekonomi daerah, selain itu juga belum dapat mencerminkan pemerataan pendapatan penduduk, Namun secara makro indikator ini masih bisa menunjukkan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat yang erat kaitannya dengan pola atau kekuatan dari ketahanan wilayah/sosial masyarakat.

4.4 Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun, Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, Pengukuran kemiskinan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan kemiskinan makro dan kemiskinan mikro.

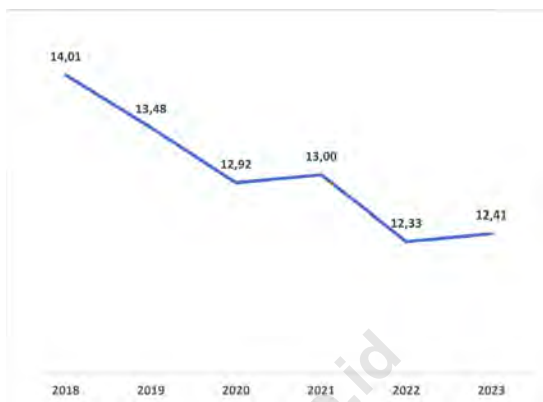
Data kemiskinan makro hanya menunjukkan jumlah dan persentase penduduk miskin di setiap daerah berdasarkan estimasi dan tidak menunjukkan siapa dan dimana posisi penduduk miskin tersebut, Secara makro jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ada sebanyak 395.660 jiwa atau sebanyak 12,82 persen dari seluruh penduduk Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk mengukur kemiskinan makro, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan, Selain persentase kemiskinan, BPS juga mengukur Indeks Kedalaman

Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*). Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Adapun garis kemiskinan tahun 2023 adalah sebesar Rp.568.248,-/kapita/bulan, dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 2,12 dan Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,54.

Gambar 10 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Tengah, 2018-2023



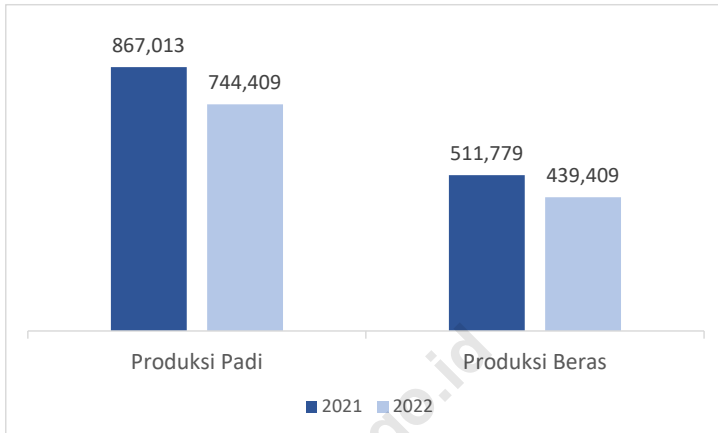
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

4.5 Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan juga menjadi salah satu indikator yang populer dalam beberapa tahun terakhir ini, hal ini erat kaitannya dengan ketersediaan pangan dan konsumsi masyarakatnya, Provinsi Sulawesi Tengah berkepentingan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan penduduknya

Produksi padi tahun 2022 sebesar 744 ribu ton padi lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 867 ribu ton padi. Hal tersebut pastinya berimbas pada produksi beras yang menurun dari 512 ribu ton di tahun 2021 menjadi 439 ribu ton di tahun 2022.

Gambar 11 Produksi Padi dan Beras di Provinsi Sulawesi Tengah, 2022-2023



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

BAB 5

STATISTIK KETAHANAN POLITIK DAN KEAMANAN

Kondisi politik dan keamanan di suatu wilayah dewasa ini nampaknya dapat ditunjukkan dengan baik oleh tingkat kerawanan atau potensi konflik di wilayah yang bersangkutan. Perkembangan kondisi politik khususnya sejak reformasi sangat pesat perkembangannya, dan berdampak pada ketahanan sosial kaitannya dengan potensi konflik yang ditimbulkannya, Dalam bagian ini akan diuraikan secara singkat kondisi ketahanan sosial di bidang politik dan keamanan meliputi kondisi politik, hukum, dan keamanan dan ketertiban.

5.1 Politik

Perkembangan politik dewasa ini semakin cepat melebihi perkembangan ekonomi maupun perkembangan penduduk, Disadari bahwa sejak bergulirnya proses reformasi, kondisi perpolitikan di tanah air mengalami revolusi baik dari sisi ideologi, organisasi politik maupun proses demokrasi, Kondisi ini menjadi latar belakang untuk mulai dikembangkan statistik politik yang sementara ini berpatokan pada tiga pilar utama sumber data statistik dasar bidang politik. Pilar pertama adalah rakyat/penduduk Warga Negara Indonesia, kaitannya

dengan keragaman suku, bahasa, agama dan budaya, penduduk yang punya hak pilih, penduduk yang tidak punya hak pilih, penduduk yang tidak tercatat dan lain-lain. Pilar kedua adalah partai politik itu sendiri dilihat dari jumlah partai politik, banyaknya kantor cabang, banyaknya pengurus, banyaknya anggota, program kerja partai dan lain-lain. Pilar ketiga adalah pemilihan umum, pemilihan kepala daerah tingkat provinsi atau kabupaten/kota, Data yang dikumpulkan mulai dari jumlah perolehan suara, anggota legislatif, jumlah suara, jumlah kursi dan lain-lain.

Pada tahun 2023 jumlah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 45 orang, terdiri dari 33 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Berikut disajikan tabel jumlah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menurut asal partai dan jenis kelamin tahun 2023.

Tabel 15 Jumlah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Asal Partai dan Jenisk Kelamin tahun 2023

Partai	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	6	1	7
2. Partai Golongan Karya (Golkar)	7	0	7
3. Partai Gerakan Indonesia Rakyat (Gerindra)	4	2	6
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	5	1	6

Partai	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
5. Partai Demokrat	2	2	4
6. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2	2	4
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2	2	4
8. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1	1	2
9. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	2	0	2
10. Partai Amanat Nasional (PAN)	2	0	2
11. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	0	1	1
Sulawesi Tengah	33	12	45

Sumber : KPUD

5.2 Keamanan dan Ketertiban

Perkembangan otonomi daerah, pemekaran wilayah, makin kritisnya masyarakat terhadap aktivitas sistem politik dan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah, berakibat kepada status keamanan di suatu wilayah, Permasalahan yang ditimbulkan dari mulai masalah hukum, keamanan dan ketertiban juga mengalami perkembangan yang cukup pesat hal ini menuntut para pelaksana di bidang ini untuk lebih meningkatkan kualitas maupun kuantitasnya.

Jumlah Kejahatan (Crime Total) di Provinsi Sulawesi Tengah selama kurun waktu 2 tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat dimana kasus kejahatan sebanyak 11.859 kasus di tahun 2020 dan 12.189 kasus di tahun 2021, demikian pula dengan jumlah kejahatan yang terselesaikan sejumlah 7.827 kasus di tahun 2020 atau 61,45 persen di tahun 2019 kemudian di tahun 2021 jumlah kejahatan yang terselesaikan sebesar 8.214 kasus atau 67,39 persen.

Tabel 16 Jumlah Kejahatan (Crime Total) dan Jumlah Kejahatan yang terselesaikan (Crime Cleared) di Provinsi Sulawesi Tengah, 2022-2023

Wilayah	Jumlah Kejahatan			
	2022		2023	
	Lapor	Selesai	Lapor	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	294	185	246	147
2. Banggai	643	396	1134	787
3. Morowali	434	183	489	320
4. Poso	239	87	338	264
5. Donggala	440	209	572	439
6. Tolitoli	327	155	513	363
7. Buol	452	290	549	385
8. Parigi Moutong	376	182	558	316
9. Tojo Una-una	234	121	478	287
10. Sigi	364	231	555	401
11. Banggai Laut*	-	-	-	-
12. Morowali Utara	338	146	376	209
13. Palu	1.717	782	2.738	987
14. Sulawesi Tengah	5.858	8.546	8.546	4.910

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

Tabel 17 menguraikan kejahatan berdasarkan Banyaknya Kejahatan Terhadap Jiwa/Badan dan Harta Benda menurut Jenisnya di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023.

Tabel 17 Jenis Tindak Pidana di Provinsi Sulawesi Tengah, 2023

Jenis Tindak Pidana	Jumlah Kejadian
(1)	(2)
Pencurian Dengan Pemberatan	324
Pencurian Kendaraan Bermotor	519
Penganiayaan Berat	4
Pencurian dengan Kekerasan	72
Kebakaran	30
Pembunuhan	31
Tindakan kesusilaan	2
Kenakalan remaja	0
Uang/Dokumen palsu	62
Narkoba	506

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan • Kuntabel • Kompeten
Harmonis • Loyal • Adaptif • Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jln. Prof. Moh Yamin, SH. No.48 Palu 94114
Telp (0451) 483610, 483611, Fax (0451) 483612
Website: <http://sulteng.bps.go.id>; email: bps7200@bps.go.id